

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anang Shophan Tornado & Muhammad Hendri Yanova. 2020. *Praperadilan Dan Hakim Tunggal*, Banjarmasin: PT. Borneo Development Project.
- . 2018. *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Nusamedia.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Arifin Rahman. 2021. *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional*. Surabaya: SIC.
- Arief Sidharta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung
- Aswanto. 2012. *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*. Yogyakarta: Rangkang.
- Bachsan Mustafa. 2016. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Cetakan 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bryan A. Garner, 2019, *Black's Law Dictionary*, Eleven Edition, West Group, St. Paul, Minn.
- Carl Joahim Friedrich. 2014. *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Terjemahan Raisul MUttaqien). Bandung: PT Nusantara dari Nusamedia.
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia, 2016. Jilid 15, Jakarta: P.T. Citra Adi Pustaka.
- Fernando M Manulang. 2016. *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung: Prakarsa.
- H.A.S. Natabaya. 2019. *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundangundangan Indonesia Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*. Cet. Terbaru. Jakarta.

- Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herbert L. Packer, 2012, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, California.
- Jimmy Asshiddiqie. 2015. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.Djohansjah. 2018. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Cet. Terbaru. Bekasi Timur: Kesaint Blanc.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif, Teoretis dan Praktik*. Cet. 2. Bandung: Alumni.
- . 2015. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Cet. 3. Bandung: PT. Alumni.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru. 2012. *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- M. Yahya Harahap. 2021. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mangajarkan Hukum Yang berkeadilan, 2019. Cetakan Biru Pembaharuan Pendidikan Hukum Berbasis Keadilan Sosial, Surabaya: The Indonesia Legal Resource Center.
- Mardjono Reksodipoetro. 2021. *Sistem Peradilan Pidana*. Cet. 5. Pusat Dokumentasi Hukum UI, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro. 2015. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum pidana*. Cet. 9. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohamad Taufik Makarao dan Suharsil. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Monang Siahaan. 2017. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Grasindo.
- O.Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya

Media.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Cet. 10. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Phillipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu,

Riduan Syahrani. 2013. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Cet. 6. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Proresif*, Yogyakarta: Genta Publishing,

-----, 2014. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rusli Muhammad. 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Berserta Putusan Kontroversial*. Yogyakarta: UII Press.

Salman Luthan. 2014. *Praperadilan di Indonesia teori, sejarah, dan praktiknya*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Cet. 8. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Setiono, 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Soedikno Mertokusumo. 2013. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cet. 4. Yogyakarta: Liberty.

Supriyadi Widodo Eddyono & Erasmus Napitupulu, 2014, *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform,

Tatang M. Amirin. 2016. *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Cet. 7. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.

Adami Chazawi, 2011, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana (Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014. *Hukum Acara Pidana. Suatu Pengantar*. Kencana, Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, *Hakim Komisaris dalam Sistem*

Peradilan di Indonesia, BPHN, Jakarta.

Hans Kelsen, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media

Indriyanto Seno Adji. 2015. *Praperadilan dan KUHAP (Catatan Mendatang)*. Diadit Media. Jakarta.

Iwan Anggoro Warsito. 2015. *Pemeriksaan Pendahuluan dan Praperadilan Pasca Putusan Mk Nomor: 21/PUU-XII/2014*. Pohon Cahaya. Yogyakarta.

L. J. Van Apeldoorn, 1996. "Pengantar Ilmu Hukum", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta

Kahar Masyhur, 1985. "Membina Moral dan Akhlak", Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta.

Mardjono Reksodiputro. 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, buku ketiga. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta.

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan penuntutan)*. Sinar Grafika. Jakarta.

YLBHI dan PSHK, 2007. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI, Jakarta.

Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Aboliionisme*, Cet. Kedua. Putra A. Nardin. Jakarta.

JURNAL

Andi Bau Malarangeng, "Solusi Praperadilan oleh Hakim Komisaris Berdasarkan RUU KUHAP", *Jurnal Pandecta*, Vol. 7, No. 1, Januari 2012.

Aqshal Muhammad Arsyah, 2020. *Cora Kristin Mulyani dkk, Kajian Labirin Hukum Penyelesaian Kasus Djoko Tjandra*, Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

- Edward Koroway, "Habeas Corpus in Ontario", *Osgoode Hall Law Journal*, Vol.13, No.1, Juni 1975.
- Faishal Zahy ,Bambang Santoso,2016. "*Analisis Tentang Alasan Pengajuan Praperadilan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tentang Legalitas Penetapan Tersangka*",*Jurnal Verstek*, Vol.8 No. 1.
- Malik, "Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, April 2019.
- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*. 2014.
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009.
- Ristu Darmawan, 2012. *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Silawane, 2016, *Analisis Yuridis Terhadap Kompetensi Hakim dalam Membatalkan Status Tersangka pada Kasus Praperadilan*, *Journal UIB*.
- Suswanto, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume I, Nomor 1, Agustus 2018.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011.

Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014.

Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN.Son

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, P4 Tap MPR No.II/ MPR/ 1978, GBHN Tap MPR No.II/ MPR/ 1983.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

kehakiman Undang-Undang tentang Kejaksaan RI

UU No. 14 tahun 1985 jo UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

SITUS WEB

Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana, <https://eprints.uns.ac.id>, diakses tanggal 01 Maret 2023.

MA Tegaskan Tak Akan Tutup Upaya Kasasi terhadap Putusan Praperadilan”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12161/ma-tegaskan-tak-akan-tutup-upayakasasiterhadap-putusan-praperadilan>, diakses pada tanggal 1 Maret 2023

<https://www.loc.gov/law/help/habeas-corpus/uk.php>, diakses tanggal 11 Maret 2023, Artikel, Clare Feikert, “*Habeas Corpus Rights: United Kingdom*”, dipublikasi di website loc.gov. (Inggris), Tanggal 30 Juli 2015.

https://www.law.cornell.edu/wex/strict_scrutiny, diakses tanggal 11 Maret 2023, Artikel, Emanuel Francone, “Strict Scrutiny”, Cornell University Law School, Juni 2016.

<http://www.history.com/topics/british-history/magna-carta>, diakses tanggal 11 Maret 2023, Artikel, “Magna Carta”, dipublikasi di website history.com.

<http://www.humanrights.com/what-are-human-rights/briefhistory/magna-carta.html>, diakses tanggal 11 Maret 2023, Artikel, “A Brief History of Human Rights”, dipublikasi di website humanrights.com.

Anti Korupsi. Upaya Hukum Atas Putusan Praperadilan, diakses melalui <https://bungbens.wordpress.com/2010/04/22/upaya-hukum-terhadap-putusan-praperadilan/>. Di akses tanggal 07 Oktober 2023.

<http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/peninjauan-kembali-pk-dalam-hukum-pidana.html>. Di akses 07 Oktober 2023.

<https://news.detik.com/berita/3195632/ma-menangkan-polda-vs-thin-po-di-pk-praperadilankarena-ada-penyelundupan-hukum> - Website Berita Detik.com diakses 07 Oktober 2023.

<https://news.detik.com/berita/d-3195632/ma-menangkan-polda-vs-thin-po-di-pk-praperadilankarena-ada-penyelundupan-hukum> - situs detik news

online diakses pada tanggal 07 Oktober 2023.

<https://www.google.com/amp/s/krupukulit.com/2013/03/19/tinjauan-kritis-atas-peran-kepalakejaksaan-tinggi-dalam-upaya-hukum-di-dalam-ruukuhap/amp> di akses pada tanggal 07 Oktober 2023

Kasasi Demi Kepentingan Hukum, Penunjang Fungsi Mahkamah Agung yang Terlupakan <http://www.leip.or.id/artikel/101-kasasi-demi-kepentingan-hukum-penunjang-fungsi-mahkamahagungyang-terlupakan.html>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2023.

Sumber Lainnya

Ahmad Wairoy selaku Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I B Sorong, Wawancara, pada tanggal 3 Juli 2023

Bripka Hasuko Yos Ardito selaku Ba Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Sorong, Wawancara, pada tanggal 17 Juli 2023.

Bernadus Papendang selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, wawancara, pada tanggal 4 September 2023

Dadang Suwanda selaku Dosen Tetap Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor Sumedang, Wawancara, pada tanggal 12 Juni 2023

Eko Nuryanto selaku jaksa Kejari Sorong, wawancara, tanggal 18 September 2023.

Hadjon, 2022. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. UGM Press, Yogyakarta

Haris Suhud Tomia selaku jaksa Kejari Sorong, wawancara, tanggal 21 September 2023.

Ihot R. P. Tampubolon selaku Kapolsek Kawasan Pelabuhan Sorong, wawancara, pada tanggal 25 September 2023.

La Dauwi selaku Ba Unit Gakkum Sat Polair Polres Sorong, wawancara, pada tanggal 23 September 2023.

Leden marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, edisi kedua, sinar frafika, Jakarta

M Faal, 2001. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta

- Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Mompang L. Panggabean, Ketua Pusat Kajian Pancasila PPs UKI, Ketua Senat UKI, wawancara wawancara Pada Tanggal 31 Oktober 2023
- Muhammad Nur Umlati selaku Kabid. Bina Marga Dinas PUPR Kab.Raja Ampat, Wawancara, pada tanggal 19 Juni 2023
- Raymond Morintosh selaku Ketua PBH DPC PERADI Sorong, wawancara, pada tanggal 24 Juli 2023.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*. Mandar Maju, Bandung
- Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung:
- Satjipto Rahardjo, 2014. *Imu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sudargo Gautama, 1993. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Alumni. Bandung.
- Setiono,2004. *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta